

**PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS
PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP *GOOD GOVERNANCE***
(*Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan*)

Eka Nurmala Sari
(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
(Mahasiswa Progran Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap *Good Governance* Pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Medan. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan dengan menggunakan metode sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket kuesioner dan browsing di Website Pemerintahan Kota Medan. Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Path Analysis* (Analisis Jalur)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan besaran pengaruh termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi sektor publik namun belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. (2) Efektifitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance* .Besarnya variasi dari variabel *good governance* yang dapat dijelaskan oleh efektivitas penerapan akuntansi sektor publik adalah sebesar 23,3 %, sedangkan sisanya sebesar 76,7 % dijelaskan atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat dalam model penelitian ini.

Kata Kunci: Efektivitas, Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, Budaya Organisasi,

PENDAHULUAN

Konsep *good governance* merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik khususnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif atau cepat dan tanggap. Mardiasmo (2006:2) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam

memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Keberhasilan penerapan *good governance* tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor internal organisasi. Faktor internal adalah berbagai faktor yang berasal dari dalam perusahaan, salah satunya adalah budaya organisasi (Daniri, 2005: 15). Senada dengan pendapat Keith Kefgen dan Manav Thadani (2003) yang menyatakan bahwa *corporate culture was viewed as an integral part of the governance mentality of a company*.

Budaya organisasi adalah suatu sistem makna atau sistem nilai bersama yang ada di dalam suatu organisasi. Hanpuwadal, Nupakorn dan Ussahawanitchakit, Phaprueke (2010) menyatakan budaya organisasi didefinisikan sebagai dukungan perusahaan untuk pengembangan etika dan teknologi pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan hubungan dan keselarasan para anggota organisasi dan pengaruh yang penting terhadap setiap aspek dari operasi perusahaan. Oleh karena itu *budaya organisasi perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi pemersatu dan pemacu gerak langkah anggota organisasi*.

Fenomena yang terjadi di Indonesia penyebab kurang berhasilnya *good governance* disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap budaya organisasi. Hal ini seperti dikemukakan Sofian Effendi (2005) yang menyatakan salah satu penyebab kurang berhasilnya reformasi administrasi untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah dan baik karena pemerintah tidak menaruh perhatian yang serius terhadap perubahan budaya organisasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memainkan peran penting di dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah dan baik. Dalam upaya merealisasikan pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diatur di dalam UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah, maka pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai *good governance (accounting for governance)*.

Akuntansi sektor publik juga terkait erat dengan paradigma otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang saat ini sedang berjalan. Kaitannya dengan reformasi sektor publik, otonomi daerah menjadi salah satu bagian dari reformasi sektor publik itu sendiri. Otonomi memberikan keleluasaan (diskresi) pada daerah untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah secara luas (Mardiasmo,2002). Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang no. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak di mulainya Otonomi Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial (*financial accountability*), akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*), akuntabilitas hukum (*legal accountability*), akuntabilitas politik (*political accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Hal ini dipertegas oleh Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa *Good governance* dan akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang kuat, dimana akuntansi sektor publik sebagai alat untuk melakukan elaborasi *good governanance* ke tatanan yang lebih riil. Urif Santoso dan Yohanes (2008) di dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. Selain itu Shil, N. C. (2008) menyatakan *accounting will show us the way to proceed with corporate governance where bad governance generally comes from financial dissatisfaction and over exercising of power*.

Pendapat lainnya juga dikemukakan Vijay Kelkar (2009) yang menyatakan bahwa akuntansi memberikan kerangka dasar yang mempengaruhi kualitas dari *good governance*. Dari beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa akuntansi khususnya akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam terciptanya *good governance*. Penelitian di Indonesia mengenai hal ini dilakukan

oleh Urif Santoso dan Yohanes (2008) yang menemukan bukti bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi domain publik pada (Mardiasmo,2009). *American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Agar tujuan-tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik dapat tercapai maka perlu adanya peningkatan terhadap efektivitas penerapan akuntansi, khususnya pada akuntansi sektor publik.

Pengembangan akuntansi dapat dijelaskan baik dari segi faktor budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan adalah kedua faktor yang membentuk konteks di mana akuntansi beroperasi, dan pengakuan dari dampak budaya pada akuntansi merupakan kontribusi penting dari literatur akuntansi internasional, Cingdem Solas and Sinan Ahyan (20081).

Budaya perusahaan dapat mempengaruhi efektivitas penerapan akuntansi. Budaya organisasi dapat membentuk tindakan manajer dan pengambilan keputusan, termasuk pilihan sistem kontrol. Dengan demikian, budaya organisasi mempengaruhi perilaku pekerja untuk efektivitas praktek akuntansi, seperti, integrasi informasi keuangan, pembentukan pelaporan, diseminasi laporan keuangan, informasi akuntansi dapat dipercaya, (Hanpuwadal, Nupakorn dan Ussahawanitchakit, Phaprueke,2010)..

Budaya organisasi adalah suatu sistem makna atau sistem nilai bersama yang ada di dalam suatu organisasi. Hanpuwadal, Nupakorn dan Ussahawanitchakit, Phaprueke (2010) menyatakan budaya organisasi didefinisikan sebagai dukungan perusahaan

untuk pengembangan etika dan teknologi pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan hubungan dan keselarasan para anggota organisasi dan pengaruh yang penting terhadap setiap aspek dari operasi perusahaan. Oleh karena itu budaya organisasi perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi pemersatu dan pemacu gerak langkah anggota organisasi.

Selanjutnya Cingdem Solas and Sinan Ahyan (2008) memberikan bukti di negara China bahwa *the criteria which claim that Chinese accounting has been shaped by together with cultural, economical and political factors in the last century*. Senada dengan penelitian yang dilakukan di Iran oleh Iraj Noravesh, Zahra Dianati Dilami, Mohammad S.Bazaz (2007) yang menyatakan *The results of this research show the relationships among cultural and accounting values in Iran and found support for more than one-half of Gray's hypotheses*. Temuan-temuan di atas ini menunjukkan bahwa ada hubungan diantara budaya organisasi dan penerapan akuntansi.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik
2. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap *Good Governance*
3. Apakah Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap *Good Governance*

KAJIAN TEORITIS

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Stephen B. Salter dan Frederick Niswander (1995) menyatakan bahwa praktik pelaporan keuangan secara aktual di pengaruhi oleh budaya. Iraj Noravesh, Zahra Dianati Dilami, Mohammad S.Bazaz (2007) menemukan hasil bahwa *the results of this research show the relationships among cultural and accounting values in Iran*.

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan antara nilai-nilai budaya dan akuntansi di Iran.

George T. Tsakumis (2007) menyebutkan bahwa *the generalizability of this result to other disclosure decisions and cultural areas is worth investigating to determine the real impact of culture on the comparability of financial statement disclosures made in accordance with International Financial Reporting Standards*. Secara generalisasi dari hasil keputusan pengungkapan lainnya dan area budaya perlu melakukan penyelidikan untuk menentukan dampak nyata dari budaya pada komparabilitas pengungkapan laporan keuangan dibuat sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Selanjutnya Cingdem Solas and Sinan Ahyan (2008) menyatakan *the development of accounting may be explained in terms of both cultural and environmental factors. Culture and the environment are both factors that shape the context in which accounting operates, and the recognition of the impact of culture on accounting is a significant contribution of the international accounting literature*. Pengembangan akuntansi dapat dijelaskan baik dari segi faktor budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan adalah kedua faktor yang membentuk konteks di mana akuntansi beroperasi, dan pengakuan dari dampak budaya pada akuntansi merupakan kontribusi penting dari literatur akuntansi internasional. Hauriasi Abraham dan Davey, Howard (2009) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh budaya terhadap praktik akuntansi di Kepulauan Solomon.

Budaya perusahaan dapat mempengaruhi efektivitas penerapan akuntansi (Hanpuwadal, Nupakorn dan Ussahawanitchakit, Phapruke, 2010). Budaya organisasi dapat membentuk tindakan manajer dan pengambilan keputusan, termasuk pilihan sistem kontrol. Sistem kontrol dan struktur kekuasaan perusahaan merupakan komponen penting dari budaya perusahaan yang unik, yang mencerminkan pola pikir yang mendasari, atau paradigma dari perusahaan (Williams dan Triest, 2009). Dengan demikian, budaya organisasi mempengaruhi perilaku pekerja untuk efektivitas praktek akuntansi, seperti, integrasi informasi keuangan, pembentukan pelaporan, diseminasi laporan keuangan, informasi akuntansi dapat dipercaya

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Terhadap *Good Governance*

Faktor yang tidak kalah pentingnya berpengaruh pada *good governance* adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi budaya organisasi itu sendiri dan cara pengorganisasiannya. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi, sehingga jika budaya organisasi maka tidak mengherankan jika anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas pula. Sehingga tidak salah jika Schein (1984), mengungkapkan bahwa banyak karya akhir-akhir ini berpendapat tentang peran kunci budaya organisasi untuk mencapai keunggulan organisasi. Budaya organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja.

Keith Kefgen and Manav Thadani, (2003) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Corporate culture was viewed as an integral part of the governance mentality of a company*. Budaya perusahaan menunjukkan bagian yang tak terpisahkan dari mentalitas *governance* dari suatu perusahaan.

Mas Achmad Daniri (2005) menyatakan keberhasilan penerapan *good governance* tersebut tidak terlepas dipengaruhi faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal adalah berbagai faktor yang berasal dari dalam perusahaan, salah satunya adalah budaya organisasi. Menurut Mardiasmo, D., et.al, (2008). *Further analysis drew the conclusion that political history and bureaucracy culture (or regional government customs and culture) are the main impediment variabls to good governance implementation*. Analisis lebih lanjut dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah politik dan budaya birokrasi (atau adat pemerintah daerah dan budaya) adalah variabel hambatan utama untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Pengaruh Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap *Good Governance*

Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Mardiasmo:2010). Sementara *World Bank* (1994) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Selanjutnya *United Nation Development Program* (UNDP) pada tahun 1997 mendefinisikan *Good Governance* sebagai berikut : *Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and the means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well-being of their population* yang artinya : Pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain suatu hubungan yang sinerjik dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*state, private, society*). Namun dalam kenyataan, negara (*state*) masih menjadi yang paling dominan.

UNDP mengajukan 9 (sembilan) prinsip sebagai karakteristik *good governance* yaitu: partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, *strategic vision*. Dari kesembilan prinsip tersebut menurut Mardiasmo (2010,18) paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, serta efektifitas dan efisiensi. Dalam rangka mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) maka pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, salah satunya dengan penerapan akuntansi sektor publik yang lebih efektif.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Domain publik di sini antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan,

universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Bastian (2009) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Penerapan akuntansi sendiri adalah suatu proses akuntansi untuk mengumpulkan, proses merubah, laporan, dan menyebarkan pelaporan kepada pengguna. Umumnya, penerapan akuntansi menyajikan informasi akuntansi organisasi untuk manajemen (Hakansson dan Lind, 2004) dan merupakan alat untuk administrasi sumber daya yang efisien, dan dukungan pengambilan keputusan yang tepat (Quattrone, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi memiliki peran penting dalam membangun pelaporan keuangan dan informasi akuntansi bagi pengguna eksternal dan internal yang digunakan untuk menilai status keuangan perusahaan dan kinerja.

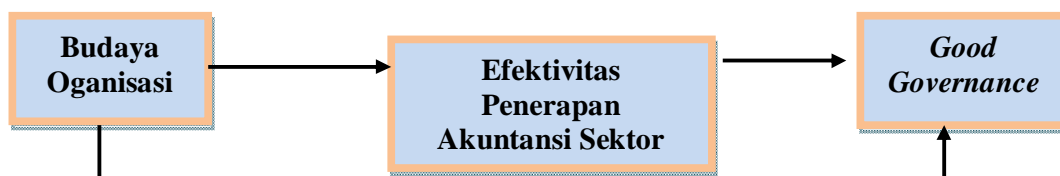
Penelitian Richard G.Sloan (2001) menunjukkan bahwa Akuntansi keuangan adalah bahan utama dalam proses *corporate governance*. Sama halnya dengan penelitian Eugene (2003) yang menyatakan bahwa *accounting and auditing are only components of the broader system of corporate governance and can't be "fixed" in any lasting way without substantive changes in the overall governance process*. Akuntansi dan auditing merupakan komponen dari sistem *corporate governance* yang lebih luas dan tidak bisa "diperbaiki" dengan cara apa pun, tanpa perubahan substantif dalam proses *governance* secara keseluruhan.

Selanjutnya Nikhil C. Shil (2009) menyatakan bahwa *Accounting is intentionally referred to as a vehicle for ensuring GCG, it is believed that the world should adopt a uniform global accounting standard and that has already been done*. Akuntansi disebut sebagai kendaraan untuk memastikan GCG, dan diyakini bahwa dunia harus mengadopsi standar akuntansi global. Vijay Kelkar (2009) menyatakan bahwa *accounting framework wich impact the quality of governance*. Kerangka kerja

akuntansi berdampak pada kualitas *governance*. Penelitian lainnya dilakukan oleh P.Brown et all (2010) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara *good governance* dengan kualitas akuntansi.

Pembahasan mengenai pengaruh akuntansi sektor publik terhadap *good governance* di Indonesia telah dilakukan oleh Mardiasmo (2002) yang menyatakan *Good governance* dan akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang kuat, dimana akuntansi sektor publik sebagai alat untuk melakukan elaborasi *good governance* ke tatanan yang lebih riil. Selanjutnya Mardiasmo (2006) menyatakan akuntansi sektor publik, yang diartikulasikan melalui akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan *auditing* sektor publik sudah sangat mendesak pengembangan dan pengaplikasiannya sebagai alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam mencapai *good governance*. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Urif Santoso dan Yohanes (2008) yang menemukan bukti bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap *good governance* dalam hal ini terhadap akuntabilitas pemerintah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Bagan kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik .
2. Budaya Organisasi berpengaruh terhadap *Good Governance*
3. Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap *Good Governance*

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah budaya organisasi, efektivitas penerapan akuntansi sektor publik, dan *good governance*.

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap *good governance*. Penelitian ini akan dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintahan Kota Medan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah verifikatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kota Medan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh SKPD yang ada di Kota Medan. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah seluruh SKPD yang ada di Kota Medan. Sedangkan yang dijadikan responden dari setiap SKPD adalah Kepala atau Wakil SKPD dan Bendahara atau Kepala Bagian Akuntansi. Sehingga dari masing-masing SKPD yang dijadikan responden adalah 2 orang. Jadi jumlah responden secara keseluruhan berjumlah 31×2 orang = 62 orang.

Dalam penelitian ini adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data Primer. Data kualitatif atau primer diperoleh dari reponden dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Kuesioner, Wawancara, dan Observasi. Data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan pertimbangan bahwa kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Untuk itu diperlukan dua macam pengujian yaitu uji Validitas (*test of validity*) dan uji reliabilitas (*test of reliability*).

Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah Analisis Jalur (*Path Analysis*). Alasan digunakan model analisis jalur tersebut, selain karena tujuan dari penelitian ini yaitu melihat sejauhmana pengaruh variabel *eksogenus* terhadap variabel *endogenus*, adalah karena hubungan kausal antar variabel yang hendak diuji dibangun atas dasar kerangka teoritis tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel tersebut. Analisis Jalur merupakan bagian dari statistika parametrik yang mensyaratkan skala minimal interval, sehingga data ordinal hasil kuesioner perlu dinaikkan menjadi skala interval melalui metode interval berurutan (*Method of Successive Interval*). Penaikan skala dari ordinal ke interval ini dilakukan untuk setiap item per subvariabel/variabel berdasarkan kepada skor ordinal responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 62 set kuesioner yang dibagikan kepada 31 SKPD yang kembali sebanyak 54 set kuesioner, dimana terdapat 4 SKPD yang tidak mengembalikan kuesioner dikarenakan melewati waktu yang telah ditentukan peneliti dalam pengumpulan kuesioner yaitu 2 minggu, sehingga kuesioner yang kembali berasal dari 27 SKPD di Kota Medan. Sehingga jumlah Kuesioner yang dapat digunakan untuk alat analisis adalah sebanyak 27 SKPD dikalikan 2 sama dengan 54 set kuesioner.

Tanggapan Responden

Analisis ini bertujuan mendapatkan gambaran mengenai jawaban responden mengenai variabel-variabel yang diteliti yang dilakukan. Adapun gambaran jawaban responden terhadap variabel-variabel penelitian dari berbagai responden SKPD di Kota Medan berdasarkan perhitungan nilai indeks untuk masing-masing variabel penelitian disajikan sebagai berikut:

Variabel Budaya Organisasi

Berdasarkan statistik deskriptif dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan nilai indeks terhadap variabel budaya organisasi, menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi memiliki indeks 88,73%, sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya

organisasi yang meliputi: profesionalisme, jarak dari manajemen, percaya pada rekan kerja, keteraturan, permusuhan/konflik dan integritas berada dalam kategori tinggi. Dari keenam indikator yang digunakan untuk mengukur variabel budaya organisasi, indikator mengenai integritas memiliki skor paling tinggi yaitu 92,18% sedangkan indikator mengenai jarak dari manajemen memiliki skor paling rendah yaitu 84,06%. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi pada SKPD Kota Medan dalam kategori baik.

Variabel Efektifitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Berdasarkan statistik deskriptif dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan nilai indeks terhadap variabel efektifitas penerapan akuntansi sektor publik, menunjukkan bahwa variabel efektifitas penerapan akuntansi sektor publik memiliki indeks 80,19%, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerapan akuntansi sektor publik yang meliputi: integrasi informasi keuangan yang memadai, pembentukan laporan keuangan yang berguna, penyebaran laporan keuangan yang efektif dan, informasi akuntansi yang dipercaya berada dalam kategori tinggi. Dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel efektifitas penerapan akuntansi sektor publik, indikator mengenai penyebaran pelaporan keuangan yang efektif memiliki skor paling tinggi yaitu 84,26%, sedangkan indikator mengenai integrasi informasi keuangan yang memadai memiliki skor paling rendah yaitu sebesar 76,04%. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi informasi keuangan yang memadai masih kurang optimal sehingga perlu perhatian yang lebih dari para pimpinan SKPD di Kota Medan.

Variabel *Good Governance*

Berdasarkan statistik deskriptif dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan nilai indeks terhadap variabel *good governance*, menunjukkan bahwa variabel *good governance* memiliki indeks 82,72%, sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* yang meliputi: akuntabilitas dan transparansi berada dalam kategori tinggi. Dari kedua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *good governance*, indikator mengenai akuntabilitas publik memiliki skor paling tinggi yaitu 85,79% sedangkan indikator mengenai transparansi memiliki skor paling

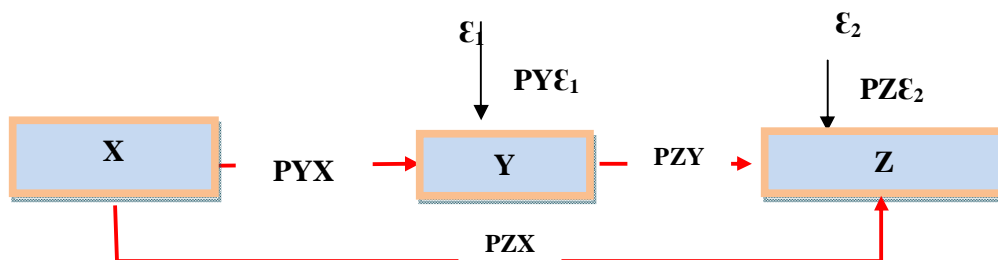
rendah yaitu 79,64%. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang ada pada SKPD di Kota Medan masih kurang optimal sehingga perlu di tingkatkan lagi.

Pengujian Kualitas Data

Sebelum analisis data dikerjakan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian atas data yang diperoleh meliputi uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan program SPSS version 17. Berdasarkan output SPSS bahwa semua pertanyaan pada kuesioner tentang variabel-variabel yang diteliti dinyatakan valid dan reliabilitas.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) atas data yang tersedia bagi variabel dependen yaitu *Good Governance* (Z) dan Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik (Y) dan variabel independen yaitu Budaya Organisasi (X). Data dari kuesioner yang memiliki skala ordinal terlebih dahulu ditransformasi menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Adapun model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Penelitian

Model di atas akan diuraikan menjadi tiga sub struktur sebagai berikut :

$$\text{Sub struktur 1 : } Y = P_{YX} \cdot X + \epsilon_1$$

$$\text{Sub struktur 2 : } Z = P_{ZX} \cdot X + \epsilon_2$$

$$\text{Sub struktur 3 : } Z = P_{ZY} \cdot Y + \epsilon_2$$

Hasil Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Aparatur Derah Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik

$$\text{Model Sub struktur 1 : } Y = P_{YX} \cdot X + \epsilon_1$$

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan SPSS, diperoleh koefisien jalur untuk mencari P_{YX} sebagai berikut

Tabel 1
Koefisien Jalur Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 22.351 | 5.031 | | 4.443 | .000 |
| | BUDAYA.ORGANISASI | .422 | .081 | .585 | 5.206 | .000 |

a. Dependent Variabel: EFF.PNERAPAN.AKT

Berdasarkan output SPSS di atas memberikan nilai *standardized beta* budaya organisasi pada persamaan pertama untuk P_{YX} sebesar 0,585 pada taraf signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa budaya organisasi mempengaruhi efektivitas penerapan akuntansi sektor publik. Besarnya pengaruh dari variabel budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik dapat dilihat dari koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS diperoleh koefisien determinasi budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik sebagai berikut:

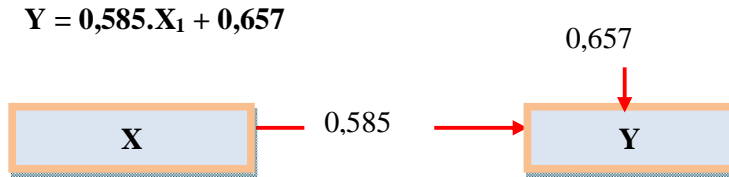
Tabel 2.
Koefisien determinasi Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik
Model Summary

| Model | Change Statistics | | | | |
|-------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|
| | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | .343 ^a | 27.103 | 1 | 52 | .000 |

a. Predictors: (Constant), BUDAYA.ORGANISASI

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh R^2 sebesar 0,343 atau 34,3%. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik sebesar 34,3% dan sisanya

sebesar 65,7% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Dengan demikian maka persamaan jalur sub struktur kedua di peroleh sebagai berikut:



Gambar 3
Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Pengujian Hipotesis

Dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:

Tabel 3
Uji Hipotesis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 22.351 | 5.031 | | 4.443 | .000 |
| | BUDAYA.ORGANISASI | .422 | .081 | .585 | 5.206 | .000 |

a. Dependent Variabel: EFF.PNERAPAN.AKT

Dari tabel 3 nilai t hasil perhitungan untuk variabel budaya organisasi sebesar 5,206 pada taraf signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t pada tabel t distribusi t, sedangkan nilai signifikansi akan di bandingkan dengan $\alpha = 0,05$. Dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) sebesar 51 diperoleh nilai t tabel sebesar $\pm 2,009$. Dikarenakan nilai t hitung untuk budaya organisasi (5,206) lebih besar dari t tabel (2,009) maka H_0 di tolak dan H_1 diterima. Hal ini bersesuaian dengan nilai signifikansi hasil perhitungan untuk variabel budaya organisasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik.

Hasil Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap *Good Governance*

Sub struktur 2 : $Z = Pzx \cdot X + \epsilon_2$

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan SPSS, diperoleh koefisien jalur untuk mencari P_{ZX} sebagai berikut:

Tabel 4
Koefisien Jalur Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Aparatur Daerah Terhadap *Good Governance*
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 25.744 | 4.736 | | 5.436 | .000 |
| | BUDAYA.ORGANISASI | .294 | .076 | .472 | 3.858 | .000 |

a. Dependent Variabel: GOOD.GOVERNANCE

Nilai *standardized beta* budaya organisasi pada persamaan kedua untuk P_{ZX} sebesar 0,472 dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa budaya organisasi mempengaruhi *good governance*. Besarnya pengaruh budaya organisasi terhadap *good governance* dapat dilihat dari koefisien determinasi. koefisien determinasi budaya organisasi terhadap variabel *good governance* sebagai berikut:

Tabel 5
Koefisien determinasi Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Variabel *Good Governance*
Model Summary

| Model | Change Statistics | | | | |
|-------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|
| | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | .223 ^a | 14.887 | 1 | 52 | .000 |

a. Predictors: (Constant), BUDAYA.ORGANISASI

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh R^2 sebesar 0,223 atau 22,3%. bahwa Budaya Organisasi terhadap *good governance* sebesar 22,3% dan sisanya sebesar 77,7% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Persamaan jalur sub struktur kedua di peroleh sebagai berikut:

$$Z = 0,472X + 0,544$$



Gambar 4
Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua

Pengujian Hipotesis

Dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:

Tabel 6
Uji Hipotesis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Variabel
Good Governance
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 25.744 | 4.736 | | 5.436 | .000 |
| | BUDAYA.ORGANISASI | .294 | .076 | .472 | 3.858 | .000 |

a. Dependent Variabel: GOOD.GOVERNANCE

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hasil perhitungan untuk variabel budaya organisasi sebesar 3,858 pada taraf signifikansi 0,000. Nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t pada tabel t distribusi t, sedangkan nilai signifikansi akan di bandingkan dengan $\alpha = 0,05$. Dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) sebesar 53 diperoleh nilai t tabel sebesar $\pm 2,009$. Dikarenakan nilai t hitung untuk budaya organisasi (3,858) lebih besar dari t tabel (2,009) maka H_0 di tolak dan H_1 diterima. Hal ini bersesuaian dengan nilai signifikansi hasil perhitungan untuk variabel budaya organisasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance*.

Hasil Analisis Pengaruh Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap *Good Governance*

Model sub struktur 3 $Z = P_{ZY} \cdot Y + \epsilon_2$

Tabel 7
Koefisien Jalur Pengaruh Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik
Terhadap *Good Governance*
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 23.587 | 5.136 | | 4.592 | .000 |
| | EFEKTIVITAS.PENERAPAN.AKUNTANSI | .418 | .105 | .483 | 3.973 | .000 |

a. Dependent Variabel: GOOD.GOVERNANCE

Berdasarkan output SPSS di atas memberikan nilai *standardized beta* efektivitas penerapan akuntansi sektor publik pada persamaan keempat sebesar 0,483 dan signifikansi pada 0,000. Hal ini berarti bahwa efektivitas penerapan akuntansi sektor publik mempengaruhi *good governance*.

Besarnya pengaruh dari variabel efektivitas penerapan akuntansi sektor publik terhadap variabel *good governance* dapat dilihat dari koefisien determinasi. Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi efektivitas penerapan akuntansi sektor publik terhadap variabel kualitas informasi akuntansi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2Z = (PZY)^2 = (0,483)^2 = 0,233$$

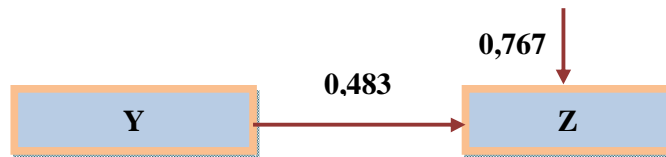
Berdasarkan tabel 8 diperoleh R^2 sebesar 0,233 atau 23,3%. Berarti Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik memberikan pengaruh terhadap *Good Governance* sebesar 23,3% dan sisanya sebesar 76,7% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 8
Koefisien determinasi Pengaruh Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap *Good Governance*
Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .483 ^a | .233 | .218 | 7.035234058 |

a. Predictors: (Constant), EFEKTIVITAS.PENERAPAN.AKUNTANSI

Dengan demikian maka persamaan jalur sub struktur ketiga di peroleh sebagai berikut: $Z = 0,483Y + 0,767$



Gambar 5
Pengaruh Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap *Good Governance*

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tabel 9 diperoleh nilai t hasil perhitungan sebesar 3,973 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t pada tabel

t distribusi t, sedangkan nilai signifikansi akan di bandingkan dengan $\alpha = 0,05$. Dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) sebesar 53 diperoleh nilai t tabel sebesar $\pm 2,009$. Dikarenakan nilai t hitung (3,973) lebih besar dari t tabel (2,009) maka H_0 di tolak dan H_1 diterima. Hal ini bersesuaian dengan nilai signifikansi hasil perhitungan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance*.

Tabel 9
Uji Hipotesis Pengaruh Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap *Good Governance*
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 23.587 | 5.136 | | 4.592 | .000 |
| EFEKTIVITAS.PENERAPAN .AKUNTANSI | .418 | .105 | .483 | 3.973 | .000 |

a. Dependent Variabel: GOOD.GOVERNANCE

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik .

Hasil pengujian pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik menunjukkan nilai t hitung (5,206) > t tabel (2,009), maka pada tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0,05$) diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Hal ini berarti budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik pada SKPD di Kota Medan.

Besaran pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik adalah 34,3%. Besaran ini termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi sektor publik namun belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa budaya organisasi pada SKPD di Kota Medan sudah baik, hal ini dapat ditunjukkan secara deskriptif yang dapat dilihat

dari skor rata-rata yang dihasilkan yaitu sebesar 88,73%. Dari seluruh indikator yang ada untuk mengukur budaya organisasi menunjukkan skor di atas 80%. Hal ini berarti budaya organisasi di SKPD Kota Medan secara keseluruhan sudah baik namun belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan, sehingga perlu adanya peningkatan lagi sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan temuan dilapangan untuk variabel efektivitas penerapan akuntansi sektor publik yang dilakukan oleh SKPD telah baik. Kondisi ini dapat ditunjukkan secara deskriptif yang dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan yaitu sebesar 80,18%. Namun dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan akuntansi sektor publik ternyata terdapat dua indikator yang memiliki skor di bawah 80% yaitu; integrasi informasi keuangan yang memadai dengan skor 76,04% dan indikator informasi akuntansi yang dipercaya dengan skor 78,50%. Berdasarkan kondisi ini diharapkan SKPD yang ada di Kota Medan perlu meningkatkan lagi integrasi informasi keuangan yang memadai dengan cara lebih memperhatikan pengelolaan dokumen secara sistematis di setiap bagian yang ada, membuat standar tunggal yang lebih ketat di dalam mengintegrasikan informasi antar bagian, memberikan perhatian lebih dalam menjembatani informasi antar bagian. Selain itu juga dalam meningkatkan hasil informasi akuntansi yang dipercaya dapat dilakukan dengan cara selalu menggunakan standar akuntansi disetiap praktek akuntansi yang ada di dalam SKPD, dan lebih mempertimbangkan proses yang ada di dalam maupun dari luar SKPD dalam menghasilkan informasi akuntansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanpuwadal, Nupakorn dan Ussahawanitchakit, Phaprueke (2010) yang menyatakan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi efektivitas penerapan akuntansi. Selain itu Hauriasi Abrahan dan Davey, Howard (2009) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh budaya terhadap praktik akuntansi di Kepulauan Solomon. Selanjutnya Stephen B. Salter dan Frederick Niswander (1995) menyatakan bahwa praktik pelaporan keuangan secara aktual di pengaruhi oleh budaya. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh S. J. GRAY 1988; Jeremy F. Dent 1991; Iraj Noravesh, Zahra Dianati Dilami,

Mohammad S.Bazaz 2007; George T. Tsakumis 2007; Cingdem Solas and Sinan Ahyan 2008, yang secara tersirat menyatakan bahwa praktik akuntansi dipengaruhi oleh budaya organisasi atau perusahaan.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap *Good Governance*

Hasil pengujian pengaruh budaya organisasi terhadap *good governance* menunjukkan nilai t hitung (3,858) > t tabel (2,009), maka pada tingkat kekeliruan 5% ($\alpha=0,05$) diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Hal ini berarti budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap *good governance* pada SKPD di Kota Medan. Besaran pengaruh budaya organisasi terhadap *good governance* adalah 22,3%. Besaran ini termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi kurang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan *good governance* sehingga belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan.

Kurang optimalnya besaran pengaruh budaya organisasi terhadap *good governance* didasarkan dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan hasil yang belum maksimal. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa budaya organisasi pada SKPD Kota Medan sudah baik, hal ini dapat ditunjukkan secara deskriptif dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 88,73%. Dari seluruh indikator yang ada mengukur budaya organisasi menunjukkan skor di atas 80%. Hal ini berarti budaya organisasi di SKPD Kota Medan secara keseluruhan sudah baik namun belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan, sehingga perlu adanya peningkatan lagi sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu hasil temuan juga menunjukkan *good governance* pada SKPD di Kota Medan juga menunjukkan kondisi yang sangat baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil statistik deskriptif yang memiliki skor rata-rata 82,72%. Walaupun rata-rata skor ini tinggi namun ternyata salah satu indikator *good governance* memiliki skor di bawah 80% yaitu indikator mengenai transparansi yang memiliki skor 79,64%.

Berdasarkan hasil pengolahan data dihasilkan bahwa pengaruh variabel budaya organisasi terhadap *good governance* tergolong rendah, yaitu hanya 22,3%. Kondisi ini dapat terjadi karena budaya organisasi hanya merupakan salah satu faktor

yang dapat mempengaruhi *good governance*, sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi *good governance* cukup banyak, sedangkan faktor-faktor itu tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Keith Kefgen and Manav Thadani, (2003) bahwa budaya perusahaan menunjukkan bagian yang tak terpisahkan dari mentalitas *governance* dari suatu perusahaan. Selanjutnya Mas Achmad Daniri (2005) menyatakan keberhasilan penerapan *good governance* tersebut tidak terlepas dipengaruhi faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal adalah berbagai faktor yang berasal dari dalam perusahaan, salah satunya adalah budaya organisasi. Selain itu Mardiasmo, D., et al, (2008) menyatakan bahwa budaya pemerintahan daerah merupakan variabel rintangan utama dalam pelaksanaan *good governance*

Pengaruh Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap *Good Governance*

Hasil pengujian pengaruh efektivitas penerapan akuntansi sektor publik terhadap *good governance* menunjukkan nilai t hitung (3,973) > t tabel (2,009), maka pada tingkat kekeliruan 5% ($\alpha=0,05$) diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Hal ini berarti efektivitas penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap *good governance* pada SKPD di Kota Medan.

Dari hasil pengujian statistik juga didapat nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,233. Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan besarnya variasi dari variabel *good governance* yang dapat dijelaskan oleh efektivitas penerapan akuntansi sektor publik adalah sebesar 23,3 %, sedangkan sisanya sebesar 76,7 % dijelaskan atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat dalam model penelitian ini. Pengaruh variabel ini dapat dikategorikan rendah. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan akuntansi sektor publik kurang mampu mempengaruhi *good governance* pada SKPD yang ada di Kota Medan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penerapan akuntansi sektor publik pada SKPD di Kota Medan sudah sangat baik, namun ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan sehingga penerapan akuntansi sektor publik dapat berjalan lebih efektif. Sedangkan temuan dilapangan menunjukkan *good governance*

pada SKPD di Kota Medan juga menunjukkan kondisi yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif yang memiliki skor rata-rata 82,72%. Walaupun rata-rata skor ini tinggi namun salah satu indikator *good governance* memiliki skor di bawah 80% yaitu indikator mengenai transparansi dengan skor 79,64%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transparansi pada SKPD di Kota masih perlu di tingkatkan lagi, sehingga transparansi pada SKPD di Kota Medan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil pengolahan data pengaruh variabel efektivitas penerapan akuntansi sektor publik terhadap *good governance* tergolong sedang, yaitu hanya 23,3%. Kondisi ini dapat terjadi karena efektivitas penerapan akuntansi sektor publik hanya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *good governance*, sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi *good governance* cukup banyak, yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Richard G.Sloan (2001) yang menyatakan bahwa akuntansi keuangan adalah bahan utama dalam proses *governance*. Sama halnya dengan penelitian Eugene A. Imhof (2003) yang menyatakan bahwa Akuntansi dan auditing merupakan komponen dari sistem *corporate governance* yang lebih luas dan tidak bisa "diperbaiki" dengan cara apa pun, tanpa perubahan substantif dalam proses *governance* secara keseluruhan. Selanjutnya Mardiasmo (2002) yang menyatakan *good governance* dan akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang kuat, dimana akuntansi sektor publik sebagai alat untuk melakukan elaborasi *good governance* ke tatanan yang lebih riil. Begitu pula dengan Shil, N. C.(2008), Vijay Kelkar (2009), dan Urif Santoso dan Yohanes (2008) yang secara tersirat menyatakan bahwa penerapan akuntansi dapat mempengaruhi *good governance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik. Besaran pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi sektor publik namun belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan.
2. Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance* Besaran pengaruh budaya organisasi terhadap *good governance*. Besaran pengaruh yang diberikan termasuk ke dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi kurang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan *good governance* sehingga belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan.
3. Efektifitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance* .Besarnya variasi dari variabel *good governance* yang dapat dijelaskan oleh efektivitas penerapan akuntansi sektor publik adalah sebesar 23,3 %, sedangkan sisanya sebesar 76,7 % dijelaskan atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat dalam model penelitian ini. Pengaruh variabel ini dikategorikan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan akuntansi sektor publik kurang mampu mempengaruhi *good governance* pada SKPD yang ada di Kota Medan.

Saran

1. Bagi SKPD yang ada di Kota Medan sebaiknya tetap mempertahankan apa yang telah dilaksanakan terhadap budaya organisasi. Selain itu penerapan akuntansi sektor publik juga yang telah berjalan efektif, namun perlu adanya peningkatan terhadap integrasi informasi keuangan yang memadai dengan cara lebih memperhatikan pengelolaan dokumen secara sistematis di setiap bagian yang ada, membuat standar tunggal yang lebih ketat di dalam mengintegrasikan informasi antar bagian, memberikan perhatian lebih dalam menjembatani informasi antar bagian. Selain itu juga dalam meningkatkan hasil informasi

akuntansi yang dipercaya dapat dilakukan dengan cara selalu menggunakan standar akuntansi disetiap praktek akuntansi yang ada di dalam SKPD, dan lebih mempertimbangkan proses yang ada di dalam maupun dari luar SKPD dalam menghasilkan informasi akuntansi. Selain itu pula SKPD di Kota Medan ebaiknya lebih bersifat terbuka terhadap informasi yang ada di dalam SKPD kepada publik, karena SKPD merupakan institusi yang mempunyai fungsi memberikan layanan kepada publik atau dalam hal ini masyarakat.

2. Bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap efektifitas penerapan akuntansi sektor publik serta berdampak terhadap *good governance* pada SKPD di Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntansi sektor publik agar berjalan efektif maka faktor budaya organisasi sangat perlu diperhatikan sehingga pada akhirnya berdampak dalam peningkatan *good governance*.
3. Bagi peneliti berikutnya, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat pengaruh dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certificated Public Accountants* (AICPA), Statement Accounting Board, New York, Oktober 1970.
- Ali Masykur Musa ,2009, *Hampir 90% SKPD Belum Bisa Buat Laporan Keuangan*, kuliah umum mengenal BPK-RI dan pemeriksaan berperspektif lingkungan di aula FE USU, Jumat (15/1/2009), *Sumber : Harian Global, Selasa – 16 Januari 2009*
- Alan D. Morrison dan William J. Wilhelm, Jr. (2004) *Culture, Competence, and the Corporation*, JEL CLASSIFICATION: J24, L20, M14, M53, O33 , First Version: October 2004
- Anwar Nasution ,2009, *Benang Kusut Laporan Keuangan Daerah*, *Majalah Akuntan Indonesia*, Mitra Dalam Perubahan, Edisi. No.18/Tahun III/ Juli 2009, hal 17-20
- Arvanitidou Virginia, Konstantinidou Eleni, Papadopoulos Dimitrios, Xanthi Chrysoula, 2007, *The role of financial accounting information in strengthening corporate control mechanisms to alleviate corporate corruption*, university of macedonia, greece
- Asian Development Bank,1999,“*Governance : Sound Development Management*, hal 7 -13

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra., 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- BPK, 2010, Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010 Melalui penguatan SPIP sesuai amanat PP 60/2008
- BPKP, 2010, Pengawalan BPKP terhadap RKP 2009 dan 2010
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, (2009), *Penyimpangan Anggaran di Sumut Mencapai Rp. 57,3 Miliar : Anggaran Panwaslih Pilgubsu Rp. 62,3 Miliar Belum Dipertanggung Jawabkan*, Analisa, Kamis – 30 April 2009, 20 April 211, di download 20 april 2011
- Bonson, E., Cortijo, V., and Escobar, T., 2009, "Towards the global adoption of XBRL using International Financial Reporting Standards (IFRS)", *International journal of Accounting Information Systems*, Vol.10, pp. 46-60.
- Carlos Batista, 2003, *ICTs and Good Governance: The Contribution of Information and Communication Technologies to Local Governance in Latin America*, NP³ - Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas Universidade de Brasilia, Brazil, January, 2003,
- Daeng M. Nazir kepala Direktorat Utama Revbang Diklat BPK, 2009, *Kualitas Laporan Keuangan Daerah Makin Buruk*, Workshop Pemaparan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2008, di kantor BPK, Jakarta, Selasa (28/4).
- Deshpande, R., J.U. Farley & F.E. Webster, 1993, "Corporate culture, customer orientation, and innovativeness in Japanese firms: A quadrad analysis", *Journal of Marketing*, Vol. 57, pp. 23-27
- Enceng, Liestyodono BI, dan Purwaningdyah MW, 2008, *Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vo. 2 No. 1, Juni 2008
- Eugene A. Imhoff, Jr, 2003, *Accounting Quality, Auditing, and Corporate Governance. Accounting Horizons, Supplement, pp 117-128*
- Fowler, Carolyn J., 1999, "The management accountant's role in quality management: A Queensland perspective", *International Journal of Applied Quality Management*. 2(1): 41-57.
- Ghazali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Cetakan Keempat, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gregory, A., 2008 "Competencies of senior communication practitioners in the UK: An initial study", *Public Relations Review*, Vol.34, 215-223.
- Glynn, J.J., 1993, *Public Sector Financial Control and Accounting*, 2nd Ed., Oxford: Blackwell.
- George T. Tsakumis, 2007, *The Influence of Culture on Accountants' Application of Financial Reporting Rules*, *ABACUS*, Vol. 43, No. 1, 2007, doi: 10.1111/j.1467-6281.2007.00216.x Journal compilation © 2007 Accounting Foundation, The University of Sydney
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB), 1999, "Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting" in *Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government*, Norwalk.

- Hakansson, H. and Lind, J., 2004, "Accounting and network coordination", Accounting Organizations and Society, Vol.29, pp.51-72.
- Hanpuwadal, Nupakorn and Ussahawanitchakit, Phapruek, 2010, *Accounting practice effectiveness and financial performance of Thai listed firms: mediating effects of decision making efficiency for tax management, competent resource allocation, and strategic planning success*, European Journal of Management Jan, 2010 Source Volume: 10 Source Issue: 1
- Hashem Nejad, H. Sajady, and M.Dastgir and, 2008, *Evaluation Of The Effectiveness of Accounting Information System* , International Journal of Information Science and Technology, Volume 6 no. 2, Juli/December 2008
- Hauriasi Abrahan dan Davey, Howard ,2009, *Accounting and culture: The case of Solomon Islands*.*Pacific Accounting Review*, 21(3) p. 228-259. Publisher Emerald;<http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1826923&show=html>
- Huang, K. T., Lee, Y.W., & Wang, R.Y.,1999, *Quality Information and Knowledge*: Pentice Hall PTR Upper Saddle River, NJ, USA
- International Federation of Accountants (IFAC), 2003, *Handbook of International Public Sector Accounting Standards*
- International Federation of Accountants, 2000, *Preface to International Public Sector Accounting Standards*, New York.
- Iraj Noravesh, Zahra Dianati Dilami, Mohammad S.Bazaz ,2007, *The impact of culture on accounting: does Gray's model apply to Iran?*, 2007, Review of Accounting and Finance, Vol. 6 Iss: 3, pp.254 – 272, publisher Emerald Group Publishing Limited
- Jane Fedoworicz and Yang W. Lee ,1999, *Accounting Information Quality ,The Review of Accounting Information System Volume 3 No.1*
- Jeremy F. Dent ,1991, *Accounting and organizational cultures: A field study of the emergence of a new organizational reality*, *Accounting, Organizations and Society, Volume 16, Issue 8, 1991, Pages 705-732*
- Jones,Gareth R., 2004, *Organizational Theory, Design and Change* , Pearson Education,Inc.,Upper Saddle River,New Jersey,07458.
- Keith Kefgen and Manav Thadani, 2003, *Corporate Governance and Organizational Culture*, Ambika Mehta, Nov 4, 2003, <http://www.hvs.com/article/658/corporate-governance-and-organizational-culture/>, di download tgl 7 nopember 2011
- Local Governance Forum* ,2002, *Introducing Good Local Governance The Indonesia, A Related Event in Conjunction with The Fourth Preparatory Committee Meeting For the World Summit on Sustainable Development Denpasar, Bali, 3-4 June 2002*
- Mardiasmo ,2007, *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Masih Dihadapi Beberapa Kesulitan*, Jurnal Otonomi Daerah. Vol VII No 2 Juni-Juli 2007
- Mardiasmo,2006, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik:Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Mei 2006 Hal 1 – 17
- Mardiasmo,2002, *Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. JAAI Volume 6 NO. 1, JUNI 2002
- Mardiasmo,2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

- Mardiasmo, Diaswati , Paul Barnes and Yuka Sakurai ,2008, *Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia*, QUTDigitalRepository:<http://eprints.qut.edu.au/>
- Marginson, D., 2006, "Information processing and management control: A note exploring the role played by information media in reducing role ambiguity", *Management accounting research*, Vol.17, pp.187-197.
- Maria Tereza Leme Fleury ,2009, *Organizational Culture and the Renewal of Competences*, *BAR, Curitiba*, v. 6, n. 1, art. 1, p. 1-14, Jan./Mar. 2009, <http://www.anpad.org.br/bar>
- Masyuri dan M. Zainuddin, 2009, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung, Penerbit Refika Aditama
- McKinnon, Jill L et al, 2003, "Organizational Culture: Associatin with commitment, Job Satisfaction, Propensity to Remain, and Information sharing in Taiwan," *International Journal Of Business Studies* Vol. 11 No. 1 June 2003, h 25 - 44.
- Mas Achmad Daniri ,2005, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, 2005, Jakarta, PT. Ray Indonesia
- Metais, E., Kedad, Z., Comyn-Wattiau, I., and Bouzeghoub, M., 1997, "Using linguistic knowledge in view integration: Toward a third generation of tools", *Data & Knowledge Engineering*, Vol.23, pp.59-78.
- Michel Camdessus ,1997, *Good Governance The IMF's Role*, The United Nations Economic and Social Council July 2, 1997, International Monetary Fund Washington, D.C. 20431 U.S.A.
- Moh.Nazir ,2005, *Metode Penelitian*, Jakarta,Penerbit Ghalia Indonesia
- Moon, M. Jae, 2000, "Organizational Commitment Revisited In New Public Management (Motivation, Organizational, Culture, Sector, and Manajerial Level," *Public Performance & Management Review*, Vol. 24, No. 2, Desember 2000, p. 177-194
- Nasution,Anwar ,2009, *Kota Medan Tak Beres' Membuat Laporan Keuangan*, Sumber : *Harian Portibi DNP*, Jumat – 23 Juni 2009
- Oliver E. Williamson , 1999, *Governance and Competence Perspectives*, *Strategic Management Journal*, Vol. 20, No. 12 (Dec., 1999), pp. 1087-1108 Published by: John Wiley & Sons Stabel URL: <http://www.jstor.org/stabel/3094080>
- Philip Brown, Wendy Beekesc and Peter Verhoeven,2011, *Corporate governance, accounting and finance: A review* *Accounting and Finance* 51 pp 96–172
- Raid Moh'd Al-adaileh ,2011, *The Impact of Organizational Culture on Knowledge Sharing: The Context of Jordan's Phosphate Mines Company*. *International Research Journal of Finance and Economics* ISSN 1450-2887 Issue 63 © EuroJournals Publishing, Inc. 2011 <http://www.eurojournals.com/finance.htm>
- Renyowijoyo, Muindro, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Edisi Ke-dua, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia , *Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*
-----, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
-----, *Undang-undang no. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
-----, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
-----, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

- Richard G. Sloan, 2001, *Financial accounting and corporate governance: a discussion. School of Business Administration*, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1234, USA
- Sekaran, Uma and Roger Bougie, 2010, *Research Methods for Business, A Skill Building Approach*, Fifth edition, New York, John Willey and Sons, Ltd Publication
- Shortridge, R.T. and Smith, P.A., 2008, "Understanding the changes in accounting thought", *Research in Accounting Regulation*,
- Schiavo-Campo, S., and Tomasi, D., 1999, *Managing Government Expenditure*, Asia Development Bank, Manila.
- Spencer.Lyle M.JR & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models for Superior Performance*, John Willey & Son Inc.
- Shil, N. C. ,2008, *Accounting for good corporate governance*, JOAAG, Vol. 3. No. 1
- S. J. GRAY ,1988, Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally, *ABACUS*, Vol. 24, No. I
- Sofian Effendi , 2005, Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governanve, Disampaikan pada Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi diselenggarakan pada Kantor Menteri Negara PAN,Y Yogyakarta 22 September 2005
- Stephen B. Salter dan Frederick Niswander ,1995, *Cultural Influence On The Development Of Accounting Systems Internationally: A Test Of Gray's [1988] Theory*, *Journal of International Business Studies*, Vol. 26, No. 2 (2nd Qtr., 1995), pp. 379-397
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- The International Accounting Standard Board, 2001, *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement*", London, UK
- Tri Widyastuti, Tafsir Hanafi ,2010, Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Implementasi Good Government Governance, *Jurnal Akuntabilitas* vol.9 no.2 tahun 2010
<http://jurnal.ekonomi.univpancasila.ac.id/index.php/Akun/issue/view/8>
- Urip Santoso dan Yohanes Joni Pabelum ,2008, *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*. *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 4 No. 1 hal. 14-33
- Vijay Kelkar ,2009, *Good Governance: Accounting Reforms*, National Academy of Audit abd Accounts , Shimia, May 2009 p.1-11.
- Vosselman, E., and Meer-Kooistra, J., 2009, "Accounting for control and trust building in interfirm transactional relationships", *Accounting, Organizations and Society*, Vol 34, pp.267-283.
- William H. Delone, Ephraim R. Mclean, 2005, *Information System Research, Information System Success: The Quest for the Dependent Variabel*.
- Wilson, James ,D, 2001, *Determining Organizational Information Needs: The Critical Success Factors Approach*, *Information research*, Valume 7 No.1
- World Bank, 1994 ,*Development in Practice, Governance: The World Bank Experience*, World Bank Publication, Washington D.C.